

**UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI DAERAH
PERBATASAN MELALUI PELAYANAN GERIATRI DI RSUD
DR. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU KABUPATEN
KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT**

TESIS

Untuk memenuhi Sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Strata 2

Program Studi Magister Ilmu
Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh:

Cory Maureen Ratu S.

25.C2.0077

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

**UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI DAERAH
PERBATASAN MELALUI PELAYANAN GERIATRI DI RSUD
DR. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU KABUPATEN
KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT**

TESIS

Untuk memenuhi Sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Strata 2

Program Studi Magister Ilmu
Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh:

Cory Maureen Ratu S.

25.C2.0077

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

ABSTRAK

UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI DAERAH PERBATASAN MELALUI PELAYANAN GERIATRI DI RSUD DR. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT

Oleh: Cory Maureen Ratu S.

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara dan diatur dalam undang-undang, khususnya lanjut usia (lansia). Geriatri merupakan cabang disiplin ilmu kedokteran yang mempelajari aspek kesehatan dan kedokteran pada warga lansia. Pemenuhan hak atas kesehatan pasien geriatri di daerah perbatasan menghadapi tantangan tersendiri akibat keterbatasan akses, sumber daya, serta karakteristik geografis daerah perbatasan. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan pelayanan geriatri, upaya pemenuhan hak atas kesehatan pasien geriatri, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan spesifikasi preskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum kesehatan, serta penelitian lapangan melalui wawancara mendalam. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelayanan kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan UUD Tahun 1945 diperkuat dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah memberikan jaminan kuat terhadap hak atas kesehatan lansia, namun dalam pengaturan ditemukan disharmonisasi tentang perbedaan paradigma antara UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait pendekatan pelayanan geriatri yang komprehensif. Kemudian Permenkes Nomor 79 tahun 2014 harus disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Pelaksanaan pelayanan geriatri di RSUD dr. Achmad Diponegoro dinilai belum optimal akibat kurangnya sumber daya manusia kesehatan (SDMK), sarana dan prasarana, aksesibilitas layanan, kondisi geografis daerah perbatasan yang sulit dijangkau serta sanksi adat. Berdasarkan hasil penelitian ini, kami merekomendasikan perubahan UU Nomor 13 Tahun 1998 dan Permenkes Nomor 79 Tahun 2014 dan agar disesuaikan dengan UU Nomor 17 tahun 2023, serta memperjelas terminologi geriatri serta cakupan pelayanan geriatri. Selain itu, Pelaksanaan pelayanan geriatri di RSUD dr. Achmad Diponegoro direkomendasikan menerapkan sistem *one stop service* untuk mengurangi mobilisasi pasien geriatri serta *telemedicine* untuk menjangkau pasien geriatri secara lebih luas.

Kata kunci: hak atas kesehatan, lanjut usia, geriatri, rumah sakit, daerah perbatasan

ABSTRACT

EFFORTS TO FULFILL THE RIGHT TO HEALTH IN BORDER AREAS THROUGH GERIATRIC SERVICES AT DR. ACHMAD DIPONEGORO REGIONAL GENERAL HOSPITAL, PUTUSSIBAU, KAPUAS HULU REGENCY, WEST KALIMANTAN

By: Cory Maureen Ratu S.

The right to health is a fundamental human right that must be fulfilled by the state and is regulated by law, particularly for older persons (the elderly). Geriatrics is a medical discipline that focuses on health and medical aspects of the elderly population. The fulfillment of the right to health for geriatric patients in border areas faces distinct challenges due to limited access, resources, and the geographical characteristics of such regions. This study aims to analyze the regulation of geriatric services, efforts to fulfill the right to health of geriatric patients, and the factors influencing their implementation at RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan.

This research employs a juridical-sociological approach with a prescriptive specification. Data were obtained through a literature review of laws and regulations as well as health law literature, and field research conducted through in-depth interviews. The data were analyzed qualitatively to assess the conformity between legal norms and health service practices..

The results indicate that the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, reinforced by Law Number 39 of 1999 on Human Right, has provided a strong guarantees for the right to health of the elderly. However, regulatory disharmony particularly due to differing paradigms between Law Number 13 of 1998 on Elderly Welfare and Law Number 17 of 2023 on Health, especially with regard to the comprehensive approach to geriatric services. Furthermore, the Minister of Health Regulation Number 79 of 2014 requires harmonization with the current health paradigm. The implementation of geriatric services at RSUD dr. Achmad Diponegoro is considered suboptimal, influenced by the shortage of health human resources, limited facilities and infrastructure, restricted service accessibility, the challenging geographical conditions of the border area, and the persistence of customary sanctions. Based on these findings, this study recommends revising of Law Number 13 of 1998 and Minister of Health Regulation Number 79 of 2014 to align with Law Number 17 of 2023 and to clarify geriatric terminology and the scope of geriatric services. In addition, it is recommended that RSUD dr. Achmad Diponegoro implement a one-stop service system to reduce geriatric patient mobility and utilize telemedicine to expand access to geriatric health services.

Keywords: right to health, elderly, geriatrics, hospital, border area